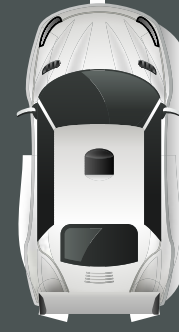


- 02** GOVERNMENT  
Makan Bergizi Gratis Dimulai, Beberapa Daerah Dilaporkan Belum Siap
- 05** PILKADA  
Catat! Hakim MK Pastikan Tak Tangani Sengketa Pilkada dari Daerah Asalnya
- 08** FAMILY  
Jam Makan yang Baik untuk Kesehatan Tubuh

**L**agi-lagi rakyat terbebani pajak baru di tahun 2025 ini. Pemerintah resmi memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor mulai Minggu (5/1/2025). Opsen pajak adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pertama, pungutan tambahan (opsen) pajak kendaraan bermotor (PKB). Kedua, opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Sebelum adanya aturan opsen, terdapat 5 kolom pungutan pajak, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), Biaya administrasi STNK, dan Biaya Administrasi TNKB. Artinya, mulai saat ini akan ada 7 kolom pungutan pajak. Berapa nilainya? Di pasal 83 disebutkan tarif opsen PKB maupun opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66 persen. Sebagai catatan, kebijakan opsen pajak kendaraan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia (kecuali Jakarta) dengan penetapan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan provinsi masing-masing. Paling tinggi 2% dari nilai jual kendaraan bermotor. Sederhananya, masyarakat pemilik mobil dan motor memang harus bersiap merogoh kocek lebih dalam.

## Beban Baru: Pungutan Tambahan Pajak Kendaraan



### TENTANG PAJAK OPSEN

- Opsen pajak adalah pungutan tambahan berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Pasal 81 menyebutkan opsen dikenakan pada PKB, BBNKB, dan MBLB.
- Pasal 82 menyatakan wajib pajak opsen adalah pihak yang terutang pajak tersebut. Pasal 83 menetapkan tarif opsen: 66% untuk PKB dan BBNKB, 25% untuk MBLB, yang diatur dalam Perda.



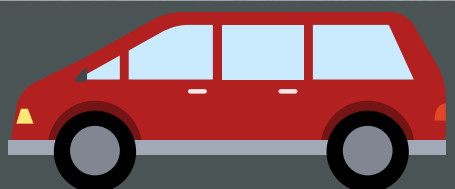
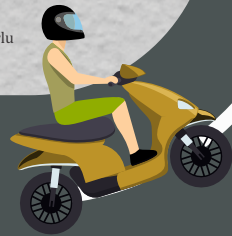
Baca Hal 11....

### CARA HITUNG OPSEN PAJAK KENDARAAN

- Misalnya, Wajib Pajak A memiliki mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp200 juta. Kendaraan itu merupakan kendaraan pertamanya.
- Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda Provinsi yang bersangkutan adalah 1,1%. Maka, PKB terutangnya adalah  $1,1\% \times Rp200 \text{ juta} = Rp2.200.000$  (jumlah ini masuk ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD Provinsi yang bersangkutan)
- Opsen PKB-nya sebesar  $66\% \times Rp2,2 \text{ juta} = Rp1.452.000$  (masuk ke RKUD Pemda Kabupaten atau Kota sesuai alamat atau NIK wajib pajak)
- Jika dijumlahkan PKB terutang dan opsen PKB, maka:  $Rp2.200.000 + Rp1.452.000 = Rp3.652.000$ .
- Nilai itu naik sekitar Rp52.000 jika dibandingkan dengan tarif 1,8% menggunakan UU No 28 Tahun 2009 yang sebesar Rp3.600.000
- Pembayaran dilakukan secara bersamaan di Samsat, kemudian bank tempat pembayaran melakukan split ke RKUD Provinsi Kabupaten/Kota. Namun, sekali lagi perlu diingat bahwa mekanisme tersebut hanya sebagai gambaran, karena setiap daerah memiliki kebijakan tarif PKB yang berbeda-beda.

### 7 KOMPONEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Berlaku Per 5 Januari 2026)

- BBNKB
  - Opsi BBN KB\*
  - PKB
  - Opsi PKB\*
  - SWDKLLJ
  - Biaya Admin STNK
  - Biaya admin TNKB
- Ket: pajak tambahan baru*



# Makan Bergizi Gratis Dimulai, Beberapa Daerah Dilaporkan Belum Siap

**JAKARTA**-Program makan bergizi gratis dimulai Senin (6/1/2025). Ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan jadi dapur untuk memasak makanan yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Namun beberapa daerah dilaporkan belum siap menggelar salah satu program andalan pemerintahan Prabowo tersebut.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunungkidul belum dapat melaksanakan program Makan Bergizi Gratis pada Senin (6/1/2025). Program kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedianya akan menyasar 3.000 siswa di Gunungkidul ini belum bisa dilakukan karena dapur belum siap.

Komandan Kodim 0730/Gunungkidul, Letkol (Inf) Roni Hermawan mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunungkidul belum dapat beroperasi karena perlengkapan dapur belum siap.

"Baik untuk pendistribusian maupun kelengkapan penunjang yang belum datang, kemudian masih ada perbaikan sedikit di bangunan karena ada kerusakan kecil di lantai," ujar Roni, Minggu (5/1/2025).

Roni menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan Makan Bergizi Gratis dapat terealisasi di Gunungkidul. Namun ia berharap program tersebut dapat secepatnya terealisasi sesuai dengan petunjuk Badan Gizi Nasional.

"Jika sudah siap untuk sementara ini unit pelayanan yang ada baru 1 di wilayah wonosari tepatnya di samping kantor Perbakin dan jumlah yang dilayani kurang lebih 3.000 orang," katanya.

Adapun jangkauan pelayanan sendiri ada pada kisaran 2,5 hingga 5 kilometer. Rencananya akan melayani SD Negeri Wonosari, SMPN 1 Wonosari, SMAN 1 Wonosari, SMKN 3 Wonosari, dan ibu hamil (bumil) serta ibu menyusui (busui), dan juga balita.

Kondisi serupa dialami Kabupaten Blora. pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Blora rencananya diundur, bakal dimulai pekan depan

Dandim 0721 Blora, Letkol Czi Yuli Hartanto, menyampaikan, "Namun karena ada perubahan dinamika, sehingga pelaksanaan dan kesiapannya belum maksimal."

"Dan dinyatakan belum siap dan rencana kegiatan Makan Bergizi Gratis di Blora pelaksanaannya diundur, direncanakan bakal dimulai Senin, 13 Januari 2025, mendatang," katanya, Minggu (5/1/2025).

Secara spesifik, Yuli Hartanto, menjelaskan alasan ditundanya pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di Blora lantaran ada beberapa hal yang belum siap.



Petugas menyiapkan makanan bergizi di gedung Satuan Pelayanan Makan Bergizi, Magelang, Jawa Tengah saat uji coba tahun lalu. (Dok.Ant)

"Di antaranya terkait kesiapan anggaran dan ada beberapa sedikit perlengkapan dapur yang belum datang. Tetapi Insyaallah minggu depan bisa terealisasi untuk wilayah Blora," jelasnya.

Menurut Yuli Hartanto, daerah lain dikabarkan ada yang mulai menerapkan program Makan Bergizi Gratis sesuai yang dijadwalkan oleh pemerintah.

"Memang ada yang besok, dan ada yang minggu depan tergantung kesiapan masing-masing dapur sehat setiap kabupaten. Untuk di Blora belum siap, sehingga pelaksanaannya diundur," paparnya.

Untuk sementara di Kabupaten Blora, baru ada 1 dapur sehat yang akan membantu menyukseskan program makan bergizi gratis. Dapur sehat tersebut berada di lokasi Jalan Bhayangkara, tepatnya di sebelah barat Lapangan Kridosono Blora.

## 190 Titik Dapur Siap Beroperasi

Badan Gizi Nasional atau BGN mengumumkan daftar satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dari dokumen yang dibagikan, tercatat 190 titik SPPG untuk program makan bergizi gratis yang akan mulai aktif di awal tahun ini yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

"Ini data 190 lokasi SPPG yang siap operasional per tanggal 6 jan 2025," ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan dalam keterangan resminya, Minggu (5/1/2025).

Ia menyatakan, 190 SPPG tersebut nantinya akan menjadi dapur untuk memasak makanan yang akan dibagikan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sebagaimana diketahui, program tersebut merupakan salah satu program unggulan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Iwan menegaskan, angka 190 tersebut datang dari jumlah peminat atau mitra yang tercatat di total 181

kecamatan yang terdaftar. Tidak seperti kecamatan lain yang memiliki 1 mitra, Kecamatan Tapos di Depok, Jawa Barat dan Kecamatan Ngemplak di Boyolali, Jawa tengah memiliki lebih dari satu mitra, yakni masing-masing 5 dan 4 mitra.

Berdasarkan data dalam dokumen yang ia berikan, Jawa Barat menjadi provinsi dengan total titik lokasi SPPG terbanyak. Dari 53 kecamatan yang terdaftar, terdapat total 57 titik lokasi SPPG, bekerja sama dengan satuan koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

Di samping itu, terdapat 37 kecamatan di Jawa Tengah dengan 40 peminat, 30 titik di Jawa Timur, 6 titik di Aceh, 1 di Bali, masing-masing 3 di Banten dan DI Yogyakarta, 5 titik lokasi di DKI Jakarta, 1 di Gorontalo, 2 di Kalimantan Selatan, masing-masing 1 di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 8 kecamatan di Kepulauan Riau, 4 titik di Lampung, masing-masing 2 di Maluku dan Maluku Utara, 1 titik di Nusa Tenggara Timur, 2 di Papua Barat, 1 di Papua Selatan, 3 titik di Riau, masing-masing 1 titik di Sulawesi Barat dan Sulawesi Utara, 8 di Sulawesi Selatan, 2 titik di Sulawesi Tenggara, dan masing-masing 1 di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. (wid, tri, ist, rls/dya)

## Titik dapur SPPG di setiap kecamatan dari setiap provinsi yang terdaftar dalam dokumen BGN

- 1. **Aceh**; 1 titik di Kecamatan Johan Pahlawan, 1 titik di Kecamatan Tapak Tuan, 1 titik di Kecamatan Bebesen, 1 titik di Kecamatan Babussalam, 1 titik di Kecamatan Peureulak, 1 titik di Kecamatan Ulee Kareng.
- 2. **Bali**; 1 titik di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- 3. **Banten**; 1 titik di Kecamatan Pamulang, 1 titik di Kecamatan Pamulang Timur, 1 titik di Kecamatan Serpong.
- 4. **DI Yogyakarta**; 1 titik di Kecamatan Banguntapan, 1 titik di Kecamatan Wonosari, 1 titik di Kecamatan Kalasan.
- 5. **DKI Jakarta**; 1 titik di Kecamatan Mampang Prapatan, 1 titik di Kecamatan Kebayoran Lama, 2 titik di Kecamatan Pancoran, 1 titik di Kecamatan Duren Sawit.
- 6. **Gorontalo**; 1 titik di Kota Tengah.

- 7. **Jawa Barat**; 1 titik di Kecamatan Bojong Soang, 1 titik di Kecamatan Cicalengka, 1 titik di Kecamatan Ciparay, 1 titik di Kecamatan Nagreg, 1 titik di Rancaekek, 1 titik di Kecamatan Patujajar, 1 titik di Kecamatan Cibitung, 1 titik di Kabupaten, 1 titik di Kecamatan Babakan Madang, 1 titik di Kecamatan Caringin, 1 titik di Kecamatan Banjarsari, 1 titik di Kecamatan Cugenang, 1 titik di Kecamatan Cikelet, 2 titik di Kecamatan Garut Kota, 1 titik di Kecamatan Sukawening, 2 titik di Kecamatan Tarogong Kidul, 1 titik di Kecamatan Karawang Barat, 1 titik di Kecamatan Cikampek, 2 titik di Kecamatan Majalengka, 2 titik di Cijulang, 1 titik di Kecamatan Pangandaran, 1 titik di Kecamatan Purwakarta, 1 titik di Purwakarta, 1 titik di Kecamatan Kalijati, 1 titik di Kecamatan Pegaden, 1 titik di Kecamatan Pegaden Barat, 1 titik di Kecamatan Purwadadi, 1 titik di Subang, 1 titik di Kecamatan Ciracap, 1 titik di Warunggiara, 1 titik di Kecamatan Rajapolah, 1 titik di Kecamatan Singaparna, 2 titik di Kecamatan Cicendo, 1 titik di Kecamatan Sukajadi, 2 titik di Kecamatan Bekasi Barat, 1 titik di Kecamatan Bekasi Selatan, 1 titik di Kecamatan Jatiasih, 1 titik di Kecamatan Tambun Selatan, 1 titik di Kecamatan Bogor Barat, 1 titik di Kecamatan Bogor Timur, 1 titik di Kecamatan Tanah Sareal, 1 titik di Tanah Sareal, 1 titik di Kecamatan Cimahi Utara, 1 titik di Kecamatan Kesambi, 1 titik di Kecamatan Sawangan, 5 titik di Kecamatan Tapos, 1 titik di Tapos, 1 titik di Kecamatan Cibereum, 1 titik di Tawang.

- 8. **Jawa Tengah**; 1 titik di Kecamatan Purwokerto Timur, 1 titik di Kandeman, 1 titik di Blora (Blora kota), 1 titik di Kecamatan Kebon Bimo, 4 titik di Kecamatan Ngemplak, 1 titik di Kecamatan Ketanggungan, 1 titik di Songgom, 1 titik di Cilacap Tengah, 1 titik di Kecamatan Jeparu, 1 titik di Kecamatan Kalinyamatan, 1 titik di Gondangrejo, 1 titik di Kecamatan Colomadu, 1 titik di Kendal, 1 titik di Kecamatan Karangdowo, 1 titik di Kecamatan Mejubo, 1 titik di Margorejo, 1 titik di Wonopringgo, 1 titik di Pemalang, 1 titik di Kemangkon, 1 titik di Kecamatan Kemiri, 1 titik di Kecamatan Pituruh, 1 titik di Sragen, 1 titik di Kecamatan Baki, 1 titik di Sukoharjo, 1 titik di Slawi, 1 titik di Temanggung, 1 titik di Kecamatan Sidoarjo, 1 titik di Kecamatan Wonogiri, 1 titik di Kecamatan Keajar, 1 titik di Magelang Selatan, 2 titik di Kecamatan Banyumani, 1 titik di Kecamatan Ngaliyan, 1 titik di Kecamatan Semarang Utara, 1 titik di Tembalang, 1 titik di Jebres, 1 titik di Kecamatan Laweyan.

- 9. **Jawa Timur**; 1 titik di Bangkalan, 1 titik di Kecamatan Modung, 1 titik di Rogojampi, 1 titik di Kecamatan Bojonegoro, 1 titik di Bondowoso, 1 titik di Kecamatan Grugujan, 1 titik di Patrang, 1 titik di Kecamatan Jombang, 1 titik di Kecamatan Lamongan, 1 titik di Kecamatan Paciran, 1 titik di Magetan, 3 titik di Kecamatan Bululawang, 1 titik di Kapanen, 1 titik di Kecamatan Pacet, 1 titik di Ngawi, 1 titik di Pacitan, 1 titik di Pademawu, 1 titik di Ponorogo, 1 titik di Kecamatan Pejarakan, 1 titik di Candi, 1 titik di Kecamatan Sidokare, 1 titik di Situbondo, 1 titik di Kota Sumenep, 1 titik di Kalidawir, 1 titik di Kecamatan Kedungwaru, 1 titik di Manguharjo, 1 titik di Wonoasih, 1 titik di Kecamatan Wonocolo.

- 10. **Kalimantan Selatan**; 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Selatan, 1 titik di Kecamatan Banjarmasin Utara.

- 11. **Kalimantan Timur**; 1 titik di Kecamatan Tenggarong.

- 12. **Kalimantan Utara**; 1 titik di Kecamatan Nunukan Selatan.

- 13. **Kepulauan Riau**; 1 titik di Kecamatan Bintan Timur, 1 titik di Kecamatan Tebing, 1 titik di Kecamatan Bunguran Timur, 1 titik di Kecamatan Batam Kota, 2 titik di Kecamatan Bengkong, 1 titik di Kecamatan Sagulung, 1 titik di Kecamatan Bukit Bestari.

- 14. **Lampung**; 1 titik di Kecamatan Kalirejo, 1 titik di Kecamatan Pringsewu, 1 titik di Kecamatan Baradatu, 1 titik di Kecamatan Blambangan Umpu.

- 15. **Maluku**; 2 titik di Kecamatan Teluk Ambon.

- 16. **Maluku Utara**; 1 titik di Kecamatan Ternate Tengah, 1 titik di Pulau Ternate.

- 17. **Nusa Tenggara Timur**; 1 titik di Kecamatan Kupang Tengah.

- 18. **Papua Barat**; 1 titik di Ransiki, 1 titik di Manokwari Barat.

- 19. **Papua Selatan**; 1 titik di Merauke.

- 20. **Riau**; 1 titik di Kecamatan Bathin Solapan, 1 titik di Kecamatan Mandau, 1 titik di Kecamatan Tualang.

- 21. **Sulawesi Barat**; 1 titik di Kecamatan Simboro.

- 22. **Sulawesi Selatan**; 1 titik di Kecamatan Barru, 1 titik di Kecamatan Ujungbulu, 1 titik di Kecamatan Binamu, 1 titik di Kecamatan Mandai, 1 titik di Kecamatan Lalabata, 1 titik di Kecamatan Bringkanaya, 1 titik di Kecamatan Mamajang, 1 titik di Kecamatan Manggala

- 23. **Sulawesi Tenggara**; 1 titik di Kecamatan Unaaha, 1 titik di Mandonga.

- 24. **Sulawesi Utara**; 1 titik di Kecamatan Langoan Utara.

- 25. **Sumatera Barat**; 1 titik di Kecamatan Pariaman Tengah.

- 26. **Sumatera Utara**; 1 titik di Kecamatan Medan Timur.

# Buka Hutan 20 Juta Ha untuk Lahan Pangan DPR Semprot Menhut: Tak Paham Filosofi Hutan

**JAKARTA-** Pemerintah berencana membuka 20 juta lahan hutan cadangan sebagai sumber ketahanan pangan, energi dan air. Luasan itu setara dengan hampir dua kali luas Pulau Jawa yang mencakup 128.297 kilometer persegi atau sekitar 12,28 juta hektare (ha).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan luasan lahan tersebut bakal ditanami sejumlah tanaman pangan dan energi, seperti padi gogo untuk alternatif sumber pangan dan pohon aren sebagai sumber bahan baku bioetanol.

Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo memberikan kritikan tajam. Firman menilai, apa yang disampaikan Raja Juli mengindikasikan sang menteri tidak paham konsep dan fungsi hutan di Indonesia.

"Inilah akibat kalau menteri yang tidak paham tentang filosofi hutan dan kehutanan. Tolong para eselon I dan II agar mengingatkan menterinya," semprot Firman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (5/1/2025).

Menurut politisi Golkar ini, kelestarian hutan penting dijaga di tengah ancaman perubahan iklim.

"Sekarang, ada niatan untuk melakukan alih fungsi hutan untuk menunjang ketahanan pangan, apalagi akan ditanam non tegakan seperti hortikultura, singkong, tebu, dan lain-lain. Memang tidak ada cara lain selain merusak hutan dan melakukan deforestasi?" lanjut Firman.

Ketua Dewan Pembina Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini menyadari, ada niat baik pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Namun cita-cita tersebut bisa diwujudkan dengan berbagai cara tanpa harus merusak hutan.

"Meningkatkan produksi pangan tidak harus selalu mengorbankan hutan. Ekstensifikasi bukan sebuah solusi, jangan selalu mencari jalan pintas dan malas berpikir untuk mencapai tujuan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penyediaan puluhan juta lahan hutan cadangan itu merupakan sarana untuk mendukung program Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Kami sudah mengidentifikasi dengan menteri pertanian, ada sekitar 20 juta hektare yang dapat dipergunakan untuk cadangan pangan energi dan air tersebut," kata Raja Juli di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/12/2024).

Raja Juli memproyeksikan



penanaman bibit padi gogo hasil pengembangan Universitas Jenderal Soedirman, Jawa Tengah di lahan 1,1 juta ha dapat menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun.

Menurutnya, jumlah tersebut setara dengan total impor beras Indonesia pada 2023. Ia juga menyampaikan bahwa luasan lahan cadangan juga diperuntukkan untuk memproduksi bioetanol dari penanaman 1,5 juta pohon aren pada lahan seluas 1 juta hektare (ha). Raja Juli mengatakan program penanaman pohon aren ini diproyeksikan dapat menghasilkan 24 ribu kiloliter (kl) bioetanol per ha.

"Ini akan bisa digunakan sebagai bahan baku pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM)," ujarnya.

Meski begitu, hasil nira dari penanaman pohon aren baru bisa dipanen setelah 6 sampai 7 tahun. Raja Juli menegaskan bahwa program ini sudah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Penanaman 1,5 juta pohon aren merupakan bagian dari program ketahanan pangan dan energi pada lahan seluas 20 juta hektar yang tersebar di seluruh kawasan lumbung pangan atau food estate di Indonesia.

Salah satu penanaman pohon nira bakal menasar food estate yang terletak di wilayah kabupaten. Hal ini diharap dapat menjadi lumbung pangan untuk desa-desa setempat. "Ini akan jadi lumbung pangan kecil, misalnya di Aceh Kabupaten dan desa-desa," kata Raja Juli.

## Greenpeace: Timbulkan Kesengsaraan

Greenpeace Indonesia menilai rencana deforestasi untuk pembukaan lahan sawit dan 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, akan menimbulkan banyak

kesengsaraan di masyarakat.

"Dampak buruknya akan sangat dirasakan, saat ini saja yang dampak iklim banyak terjadi, seperti banjir, kekeringan kehilangan akses terhadap pangan, kebakaran," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Muhammad Iqbal Damanik.

Menurut Iqbal, membatat hutan seluas dua puluh hektare dengan alasan menyediakan cadangan pangan dan energi adalah fikiran yang salah kaprah, lantaran salah satu fungsi hutan justru menyimpan cadangan air.

"Hutan itu sebagaimana kita lihat di atas, sebegitu lah dia juga akar-akarnya menyebar di bawah tanah dan itu menyimpan cadangan air. Jadi kalau itu dibuka, ya airnya akan lepas," ucap Iqbal.

Selain itu, dia menilai pandangan pemerintah yang salah lainnya adalah berfikir kalau hutan itu adalah sebuah lahan yang kosong, sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Padahal, di situ ada masyarakat lokal dan adat yang menggantungkan kehidupannya pada hutan.

"Jadi hutan ini seperti supermarket mereka, menyediakan lahan pangan, menyediakan kebutuhan air," tutur Iqbal. "Makanya sangat bertolak belakang dengan ketahanan pangan dan air. Hutannya terbuka ya airnya enggak ada. Karena dia akan lepas tidak tertampung," ucap dia lagi.

Ia juga menyinggung kegagalan pemerintah dalam program food estate, di mana dalam program tersebut pemerintah juga membatat habis lahan hutan. Menurut aktivis lingkungan itu kebijakan ini seperti mengulang kegagalan yang sama.

"Kami tahu bahwa isu penanganan energi ini pasti soal food estate. Dimana sih food estate yang berhasil? Enggak ada," ujar dia.

Ia juga mengingatkan pemerintah

## 10 PROVINSI DENGAN DEFORESTASI TERTINGGI 2023

Kalimantan Barat

35.162

Hektare

Kalimantan Tengah

30.433

Kalimantan Timur

28.633

Sulawesi Tengah

16.679

Kalimantan Selatan

16.067

Kalimantan Utara

14.316

Riau

13.268

2023

12.640

2022

11.336

2022

67.860

Sumber : Deforestasi Indonesia 2023

bahwa tidak semua pohon sama. White land atau lahan gambut itu menyimpan karbon dioksida lebih banyak dibandingkan dengan pohon lainnya. "Jadi ini sangat tidak masuk akal, dan asal bunyi dalam pandangan kami," ucap dia. (din, rls, ant/dya)

# Prabowo Masuk Daftar 10 Pemimpin Dunia Bakal Berpengaruh 2025

JAKARTA-Media ternama Singapura, Straits Times, menempatkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam daftar 10 Pemimpin Dunia yang Harus Diperhatikan di 2025.

Nama Prabowo bersanding dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Donald Trump, Xi Jinping, hingga Vladimir Putin.

Selain Prabowo, dikutip Minggu (5/1/2024) daftar tersebut juga menyoroti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, menjadikan mereka dua pemimpin Asia Tenggara yang diprediksi memainkan peran besar dalam dinamika global mendatang.

Straits Times menggambarkan Prabowo sebagai "presiden pertama Indonesia yang sangat fokus pada kebijakan luar negeri."

Dalam waktu kurang dari satu bulan setelah pelantikannya pada Oktober 2024, Prabowo langsung menggebrak panggung internasional. Dia mengunjungi Cina, Amerika Serikat, Peru, Brasil hingga Inggris.

Ketika di Cina, Prabowo bertemu Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan ketua parlemen. Pertemuannya itu menyepakati memperkuat kerja sama kedua negara di bidang ekonomi hingga pertahanan.

Setelah itu, Prabowo ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden Joe Biden. Prabowo kemudian menghadiri konferensi tingkat tinggi APEC di Peru dan melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral. Prabowo lalu menghadiri KTT G20 di Brasil.

Prabowo setelah itu berkunjung ke Inggris. Prabowo kemudian bertemu Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer.

"Ini menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia di pusat diplomasi internasional," tulis laporan itu.

Pendekatan ini mencerminkan visinya untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat diplomasi internasional, yang menurut Straits Times lebih berorientasi pada ekonomi dibandingkan geopolitik.

Presiden RI ke-8 itu menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen, naik dari angka 5 persen saat ini.

Namun, pencapaian target tersebut tidak mudah. Straits Times menyoroti keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada investasi infrastruktur besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas di IKN, serta menarik investasi langsung asing.

Dalam tulisan yang rilis pada Sabtu (4/1/2025) itu, disebutkan bahwa Prabowo tidak ragu mengambil langkah berbeda dari pendahulunya,



Presiden RI, Prabowo Subianto. (Dok.Setpres RI)

Presiden Joko Widodo.

Salah satunya adalah mendorong kemitraan Indonesia dengan BRICS, termasuk pengajuan status keanggotaan penuh di organisasi tersebut, hanya beberapa hari setelah resmi menjabat.

Straits Times juga mencatat kemungkinan Prabowo memperkuat kerja sama dengan PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam mewujudkan agenda ASEAN, termasuk investasi lintas batas, penguatan rantai pasok, dan pembangunan berkelanjutan.

Gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilai "tidak ortodoks" turut menjadi sorotan. Misalnya, mengirim menteri-menterinya ke pelatihan ala militer dan melakukan panggilan langsung kepada Donald Trump,

menawarkan pertemuan di mana pun di dunia.

Keputusannya menjalin hubungan yang lebih erat dengan China dan Rusia memicu perdebatan di dalam negeri, terutama terkait apakah langkah tersebut sejalan dengan kepentingan strategis Indonesia secara keseluruhan.


Media ini juga menyoroti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menemukan sosok sekutu dalam diri Prabowo. Prabowo dianggap dapat memberikan dukungan kuat bagi pencapaian Malaysia di ASEAN. Pencapaian ini akan memfasilitasi investasi lintas batas, konektivitas rantai pasokan, dan pembangunan berkelanjutan, serta sejalan dengan penekanan pemerintahannya pada "pembangunan yang berorientasi

pada pertumbuhan".

Straits Times menutup analisisnya dengan menyatakan bahwa kesuksesan Prabowo dalam agenda globalnya akan sangat ditentukan oleh dukungan domestik.

"Pemimpin membutuhkan dukungan kuat di dalam negeri untuk bisa membawa negaranya melewati masa-masa penuh tantangan," tulis mereka. (wid, sti, ist/dya)

## 10 PEMIMPIN DUNIA BAKAL BERPENGARUH 2025

-  Presiden terpilih AS **Donald Trump**
-  Presiden China **Xi Jinping**
-  PM Jepang **Shigeru Ishiba**
-  Pemimpin Korea Utara **Kim Jong-un**
-  PM India **Narendra Modi**
-  PM Australia **Anthony Albanese**
-  Presiden Indonesia **Prabowo Subianto**
-  PM Malaysia **Anwar Ibrahim**
-  Presiden Rusia **Vladimir Putin**
-  PM Israel **Benjamin Netanyahu**

## Pengamat: Posisikan Jadi Middle Power

**PRESIDEN** Prabowo Subianto dinilai membangun posisi Indonesia sebagai middle power alias kekuatan tengah di antara negara-negara besar dalam percaturan global. Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah mengatakan, Prabowo juga yakin sebagai pemimpin di Asia Tenggara.

"Presiden Prabowo saat ini menempatkan dirinya sebagai qualified middle power yakni siap langsung berurusan dengan kekuatan-kekuatan besar dan sudah yakin dengan statusnya di Asia Tenggara sebagai pimpinan tradisional ASEAN," kata Rezasyah, Minggu (5/1/2025).

Menurutnya, Presiden Prabowo maklum jika ASEAN selama ini telah mengunci Indonesia bak dalam kurungan yang memperlambat

kapasitas Indonesia untuk bersinergi di level global. Dia menyebut selama ini energi Indonesia terkuras dalam berbagai konsensus ASEAN Community.

Kurang dari sebulan setelah dilantik, Prabowo memulai lawatan diplomatik mengunjungi Tiongkok dan Amerika Serikat kemudian menghadiri KTT APEC. Hal itu mengisyaratkan keinginannya untuk menempatkan Indonesia di jantung diplomasi internasional.

Kemudian, Indonesia mengajukan diri dan mendapat status negara mitra BRICS. Menurut Rezasyah, langkah Indonesia seperti di BRICS dapat dibaca sebagai wujud peran sebagai middle power.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai middle power memungkinkan untuk bisa lebih aktif dan percaya diri dalam membangun

dukungan terkait krisis dunia terkini.

"BRICS akan menjadi wahana yang strategis, yang memungkinkan Indonesia untuk secara langsung berurusan secara bilateral dengan Tiongkok, India, dan Rusia, guna mempercepat pencapaian perjanjian strategis yang telah disepakati," ujarnya.

"Kombinasi kekuatan ekonomi dan militer yang telah terbangun dalam BRICS dan D-8 memungkinkan Indonesia bersikap lebih pro-aktif dan percaya diri. Khususnya dalam menyikapi perkembangan di Gaza, Libanon, dan Suriah. Karena Indonesia melihat ASEAN tidak lagi solid dalam memandang penyelesaian krisis di atas," ucap Rezasyah. (med, ist/dya)

# Catat! Hakim MK Pastikan Tak Tangani Sengketa Pilkada dari Daerah Asalnya

**JAKARTA** - Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan menangani perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari daerah asal masing-masing. Hal itu dianggap mencegah potensi konflik kepentingan MK terhadap perkara sidang.

"Para Hakim Konstitusi di Panel tersebut tidak akan memeriksa perkara PHPU Kepala Daerah yang diajukan dari daerah asalnya," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz saat dihubungi, Minggu (5/1/2025).

Faiz mengatakan seluruh perkara yang telah teregistrasi akan dibagi pemeriksaannya ke dalam tiga panel berbeda. Setiap panel akan terdiri atas 3 hakim konstitusi.

"Seluruh perkara yang telah diregistrasi akan dibagi pemeriksaannya secara proporsional ke dalam tiga panel berbeda yang masing-masing panel terdiri dari 3 hakim konstitusi," tuturnya.

Terkait persiapan sidang, Faiz mengatakan para hakim akan mempelajari dahulu permohonan perkara yang telah teregistrasi. Sidang pemeriksaan pendahuluan diketahui akan digelar pada 8 Januari 2025.

"Para hakim konstitusi tentunya akan mempelajari terlebih dahulu seluruh permohonan yang sudah diregistrasi sebelum diperiksa di dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang rencananya akan diadakan mulai tanggal 8 Januari 2025," ucapnya.

Di sisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti persidangan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisioner KPU Iffa Rosita menuturkan, lembaganya telah memberikan arahan kepada KPU Provinsi yang ada di seluruh Indonesia, sebelum menerbitkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik atau e-BRPK.

Adapun arahan ini, kata dia, untuk membuat kronologis dan pemetaan PHP kepala daerah agar memudahkan KPU Pusat dalam melakukan kajian. "Membuat kronologis dan matriks pemetaan sengketa agar memudahkan tim kami melakukan kajian dan memberikan arahan lebih lanjut dalam menghadapi sengketa PHP," ujar Iffa Rosita.

Selain itu, dia mengatakan telah meminta KPU Provinsi di Indonesia sebagai koordinator lembaga yang ada di kabupaten atau kota. Memastikan adanya PHP kepala daerah, misalnya, untuk kesiapan dalam menghadapi proses tahapan penyelesaian sengketa hasil pemilihan ini, dari faktor



Ilustrasi sidang perkara di MK. (Istimewa)

anggaran hingga sumber daya manusia.

"KPU Pusat sebagai penanggungjawab akhir terus melakukan pendampingan untuk penguatan bagi KPU Provinsi, Kabupaten atau Kota yang terdapat permohonan sengketa," ucap dia.

Seperti membuat jawaban dan penyajian serta penataan alat bukti, yang diungkapkan Iffa Rosita untuk memenuhi permohonan pemohon dalam menghadapi sidang PHP kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.

"Dalam membuat jawaban dan penyajian serta penataan alat bukti sesuai pokok permohonan pemohon dan memastikan semua telah sesuai," tutur Iffa Rosita.

### 309 Perkara Teregistrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) diketahui telah mendaftarkan 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024 pada Jumat (3/1/2025). Dari total tersebut, 23 di antaranya merupakan perkara PHP Gubernur dan Wakil Gubernur. Sedangkan untuk PHP Walikota dan Wakil Walikota sebanyak 49 perkara, dan 237 lainnya merupakan perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati.

Total perkara yang teregistrasi tersebut merupakan hasil penyaringan dari 314 permohonan yang diajukan ke MK. Sebagian permohonan diajukan secara daring (online) melalui [simpel.mkri.id](http://simpel.mkri.id). Sebagian lainnya diajukan secara luring atau secara langsung di Gedung MK, Jakarta.

Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Pan Mohamad Faiz, selisih jumlah perkara yang teregistrasi dengan yang dimohonkan lantaran adanya calon pemohon yang mengajukan permohonan secara luring maupun daring, sehingga terdapat dua permohonan.

"Itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas, sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan

permohonannya itu secara daring dan luring dua kali, maka kita tidak akan mendaftarkan dua-duanya, pemohonnya sama, kuasa hukumnya sama, maka kita akan registrasi satu saja," ujar Faiz.

Begitu perkara teregistrasi, maka selanjutnya MK akan menyampaikan salinan permohonan kepada Termohon yang dalam hal ini ialah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU D) dengan tembusan KPU. Selain itu, salinan permohonan juga akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Sementara penyampaian salinan permohonan dilakukan, MK juga akan mendata Pihak Terkait. Adapun pengajuan Pihak Terkait sudah dapat dilakukan sejak perkara diregistrasi hingga dua hari kerja.

"Setelah kita mendapatkan registrasi perkara, maka para pihak yang ingin mengajukan diri menjadi Pihak Terkait, mereka punya waktu dua hari kerja sejak diregistrasi. Artinya per hari ini dan (karena) besok Sabtu (dan) Minggu itu libur, maka hari terakhirnya adalah Hari Senin," kata Faiz.

Setelahnya, Hakim Konstitusi akan mengadakan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk menetapkan para Pihak Terkait. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024, penetapan Pihak Terkait akan dilaksanakan pada 6-14 Januari 2025.

Dengan demikian, sidang perdana PHP Kada 2024 akan dilaksanakan pada Rabu (8/1/2024) mendatang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Sementara untuk Jawaban dan Keterangan dari Pihak Terkait, itu diajukan satu hari kerja sebelum pemeriksaan sidang berikutnya.

"Jadi mereka (Pihak Terkait) bisa hadir dulu, mendengarkan apa saja yang menjadi dalil-dalil atau argumentasi permohonan. Setelah itu mereka bisa mempersiapkan secara matang," kata Faiz. (wid, rls, din/dya)

### TAHAPAN & JADWAL SIDANG SENGKETA PILKADA 2024 DI MK

- 27 November 2024 - 16 Desember 2024  
Penetapan perolehan suara
- 27 November 2024 - 18 Desember 2024  
Pengajuan permohonan
- 27 November 2024 - 20 Desember 2024  
Perbaikan Permohonan
- 10 Desember 2024 - 03 Januari 2025  
Pemeriksaan Kelengkapan
- 20 Desember 2024 - 10 Januari 2025  
Penetapan Pihak terkait
- 19 Desember 2024 - 06 Januari 2025  
e-BRPK & penyampaian e-ARPK
- 19 Desember 2024 - 07 Januari 2025  
Penyampaian salinan permohonan
- 19 Desember 2024 - 07 Januari 2025  
Pengajuan Permohonan pihak terkait
- 20 Desember 2024 - 10 Januari 2025  
Penetapan pihak terkait
- 24 Desember 2024 - 14 Januari 2025  
Pemeriksaan Pendahuluan
- 31 Desember 2024 - 30 Januari 2025  
penyampaian jawaban termohon, pihak terkait & bawaslu
- 3 Januari 2025 - 31 Januari 2025  
Pemeriksaan persidangan
- 20 Januari 2025 - 11 Februari 2025  
Rapat permusyawaratan hakim
- 30 Januari 2025 - 13 Februari 2025  
Sidang Pengucapan Putusan
- 30 Januari 2025 - 17 Februari 2025  
Penyampaian salinan putusan
- 03 Februari 2025 - 25 Februari 2025  
Penyampaian Persidangan Lanjutan
- 13 Februari 2025 - 06 Maret 2025  
Rapat Permusyawaratan Hakim
- 24 Februari 2025 - 11 Maret 2025  
Pengucapan Putusan
- 24 Februari 2025 - 13 Maret 2025  
Penyampaian salinan putusan

### PANEL HAKIM PADA SENGKETA PILKADA 2024.

- **Panel 1:**  
Ketua panel satu Suhartoyo berdampingan dengan Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah.
- **Panel 2:**  
Ketua panel dua Saldi Isra bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.
- **Panel 3:**  
Ketua panel tiga Arief Hidayat bersama Anwar Usman dan Enny Nurbaningsih.

# Kota Malang Waspada PMK Peternak Diminta Tahan Pembelian

**MALANG** - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang meminta peternak untuk menahan diri membeli ruminansia baru, seperti sapi, kambing, dan domba untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Imbauan ini menyusul terdeteksinya 25 kasus PMK di akhir tahun 2024, yang sebagian besar disebabkan oleh mobilisasi hewan tanpa pengawasan kesehatan yang memadai.

"Karena dari 25 kasus yang terlapor pada Desember 2024 kemarin, kebanyakan karena hewan ternak yang dibeli di pasar. Yang paling penting juga kami menginfokan ke peternak untuk sementara ini, jangan membeli ternak baru dulu," ujar Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Malang, Anton Pramujiono, dikonfirmasi melalui sambungan selular, Minggu (5/1/2025).

Anton menegaskan, pengawasan lalu lintas hewan terus dilakukan untuk memastikan kesehatan ruminansia yang masuk atau keluar

dari Kota Malang. Pihaknya juga mengimbau peternak agar lebih berhati-hati dalam mendatangkan hewan baru, karena proses pengangkutan dapat menjadi media penularan virus PMK.

"Karena apakah ada penyakit baru saat pengantaran, dalam kendaraan, kan kita gak tahu jalannya virus itu. Jadi sementara ini sarannya peternak jangan beli ternak baru dulu," kata Anton.

Menurutnya, jika peternak masih ingin membeli hewan ternak baru, maka harus benar-benar memperhatikan kesehatan hewan ternak. Yakni telah disertai surat keterangan kesehatan hewan (SKKH), yang menunjukkan hewan telah divaksin. "Sehingga daya tahan tubuh si ternak itu masih ada," imbuhnya.

Selain itu, Dispangtan Kota Malang kini mengoptimalkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada para peternak terkait bahaya PMK. Sosialisasi terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit ini.

Lebih lanjut, menurutnya Dispangtan Kota Malang juga



Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan saat meninjau tes kesehatan hewan ternak. (dok. Dispangtan Kota Malang)

melakukan pemantauan intensif di sejumlah lokasi peternakan, khususnya di peternakan sapi perah dan sapi potong yang berada di Kecamatan Sukun dan Kedungkandang.

"Sampai hari ini juga teman-teman terus keliling ke beberapa lokasi meninjau apakah ada kasus lagi, karena takutnya ada penularan. Jadi kalau memang ditemukan kasus selama peninjauan, cepat kami tangani

agar tidak ke tempat lain," tambahnya.

Terkait vaksinasi, Anton menjelaskan hingga saat ini, Pemkot Malang masih belum mengalokasikan anggaran vaksinasi untuk mengatasi PMK. Kendati demikian, Anton menegaskan peternak diperbolehkan untuk membeli vaksin secara mandiri melalui distributor resmi yang direkomendasikan oleh Dispangtan. (Santi/Dya)

## Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Malang Ada Sejak 2023, Bakal Intens Beroperasi di Pertengahan 2025



Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Malang yang melibatkan lembaga kemasyarakatan. (dok. ist/LingkarSosial Malang)

**MALANG**- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mengungkapkan rumah perlindungan sementara akan mulai beroperasi secara intensif pada pertengahan tahun 2025.

Sebenarnya, sejak 2023 lalu rumah perlindungan ini telah difungsikan untuk melayani perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya memberikan tempat aman dan layanan pendampingan kepada para korban.

"Kalau difungsikan sudah sejak

tahun 2023. Tapi nanti rencana beroperasi secara intens dan akan diresmikan sekitar pertengahan 2025," ujar Kepala DP3A Kabupaten Malang, Arbani Mukti Wibowo, Minggu (5/1/2025).

Arbani juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2023, rumah perlindungan ini telah menerima 3 korban yang membutuhkan tempat perlindungan terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Sedangkan di tahun 2024 ini

menurutnya belum ada laporan ataupun kasus baru yang ditangani.

"Selama beroperasi, sudah ada tiga korban yang melapor dan membutuhkan perlindungan karena kasus kekerasan seksual anak. Untuk tahun 2024, belum ada laporan baru," kata Arbani. Arbani menyebutkan, rumah perlindungan sementara ini berlokasi di Kecamatan Pakis dan menyediakan empat-lima tempat tidur bagi para korban.

Ditambahkannya, selain menyediakan akomodasi yang layak, rumah perlindungan ini juga akan dilengkapi dengan berbagai layanan pendampingan lainnya, seperti layanan psikologis dan bantuan hukum untuk korban yang membutuhkannya.

"Di rumah perlindungan sementara ini kami juga bekerja sama dengan Yayasan Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara (Koppatra) untuk memastikan kebutuhan korban selama berada di sini dapat terpenuhi. Semua biaya yang diperlukan akan ditanggung oleh DP3A Kabupaten Malang dan pihak ketiga yang bekerja sama," jelas Arbani.

Lebih lanjut, untuk dapat memperoleh layanan di rumah perlindungan sementara, Arbani menyebutkan proses dimulai dengan koordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Koordinasi ini dapat dilakukan oleh korban itu sendiri, keluarga, kerabat, atau siapa saja yang mengetahui adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

"Jika korban merasa trauma atau terancam, mereka bisa menjalani rawat inap di rumah perlindungan sementara. Ini dilakukan untuk mengantisipasi agar trauma korban tidak kembali muncul dan juga untuk melindungi korban dari ancaman pelaku yang mungkin masih ada di sekitar mereka," kata Arbani.

Mengakhiri pernyataannya, Arbani menjelaskan rumah perlindungan sementara ini bertujuan memberikan tempat aman bagi korban untuk pemulihan trauma. Mengingat pelaku seringkali orang terdekat, fasilitas ini diharapkan membantu korban memperoleh penyembuhan emosional dan psikologis sebelum kembali menjalani kehidupan sehari-hari. (Santi/Dya)

# Rusia-AS Memanas Usai Kremlin Tembak Jatuh 8 Rudal Ukraina

**MOSKOW**-Rusia bersumpah akan membalas setelah mengklaim sistem pertahanan udaranya menembak jatuh delapan rudal ATACMS buatan Amerika Serikat (AS) yang ditembakkan oleh Ukraina. Rusia menganggap rudal yang punya jangkauan hingga 300 Km tersebut sebagai eskalasi besar.

Dilansir CNN, Minggu (5/1/2025), Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh delapan rudal balistik bersama 72 pesawat udara tak berawak (UAV) atau drone. Rusia menyebut tindakan rezim Kyiv yang didukung oleh Barat akan dibalas.

Rusia mengatakan beberapa pesawat tanpa awak dihancurkan di wilayah Leningrad di barat laut dan satu di Kursk, tempat Ukraina melancarkan serangan mendadak akhir musim panas lalu. Presiden AS Joe Biden yang akan lengser sebelumnya telah menyetujui penggunaan ATACMS oleh Kyiv.

Dia mengatakan hal itu sebagian sebagai tanggapan terhadap Rusia yang memperluas konflik dengan mengerahkan pasukan Korea Utara.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan menanggapi serangan Ukraina menggunakan ATACMS dengan rudal balistik baru Rusia yang berkemampuan nuklir 'Oreshnik'.

Bulan lalu, Putin mengisyaratkan rudal itu dapat ditembakkan ke ibu kota Ukraina, Kyiv. Peluncuran senjata eksperimental pertama dan satu-satunya itu menargetkan wilayah Dnipro Ukraina pada 21 November 2024.

Kantor berita pemerintah Rusia, TASS, menyebut serangan pesawat nirawak Ukraina telah membuat pembatasan sementara diberlakukan di bandara St Petersburg. Gubernur oblast Leningrad, Aleksandr Drozdenko, mengatakan lewat Telegram bahwa 'malam dan pagi hari tanggal 4 Januari memecahkan rekor dalam hal jumlah UAV yang dihancurkan' dengan empat UAV ditembak jatuh di wilayahnya.

Seorang pejabat keamanan Ukraina, Andrii Kovalenko, mengatakan sebuah pelabuhan di



Rumah hancur akibat serangan rudal Rusia, Chernihiv, Ukraina (4/1/2025). (reuters)

Leningrad menjadi sasaran, menyebutnya sebagai 'instrumen kelangsungan hidup ekonomi dan militer Rusia secara terpisah'.

Sementara itu, Rusia meluncurkan total 81 pesawat nirawak ke Ukraina pada Jumat (3/1/2025) hingga Sabtu (4/1/2025) malam. Komando Angkatan Udara Ukraina drone itu

termasuk pesawat nirawak Shahed buatan Iran dan 'berbagai jenis pesawat nirawak tiruan'.

Sekitar 34 pesawat nirawak serang Shahed dan jenis pesawat nirawak lainnya ditembak jatuh. Pesawat nirawak yang ditembak jatuh tersebut menyebabkan kerusakan di wilayah Chernihiv dan Sumy. (Santi/Dya)

## Polemik Mantan Presiden Korsel Yoon

# Penangkapan Gagal, Paspampres Dituding Menhalang-halangi



Semangat demonstran di Korsel tak kendur meski menghadapi badai salju. (AFP).

**SEOUL**-Park Chong-jun adalah kepala pasukan pengaman presiden (Paspampres) Korea Selatan. Park yang melapor langsung kepada Presiden Yoon Suk Yeol, berperan penting dalam menolak upaya para penyelidik pada Jumat (3/1/2025) untuk memberikan surat perintah penangkapan kepada Yoon. Penolakan ini yang mengakibatkan kebuntuan selama enam jam di kediaman resmi Yoon..

Dikutip dari Reuters, Minggu (5/1/2025), pengawal presiden dan pasukan militer mencegah pihak berwenang untuk menangkap Yoon atas dugaan pemberontakan terhadap surat perintah tersebut, yang berlaku hingga Senin (6/1/2025). Badan anti-korupsi yang memimpin penyelidikan bersama polisi mengatakan mereka sedang menyusun langkah selanjutnya.

Deklarasi darurat militer yang

diumumkan Yoon pada 3 Desember 2024 diketahui menyebabkan pemakzulan dan pemberhentiannya pada 14 Desember 2024. Nasib politik presiden berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

"Pasukan Pengamanan Presiden ada semata-mata untuk keselamatan mutlak target keamanan," kata Park dalam sebuah pesan di situs web layanan tersebut, dan menambahkan bahwa misinya untuk melindungi presiden "setiap saat" tidak boleh meninggalkan celah.

Para kritikus khawatir bahwa pelayanan Park yang berlebihan."Paspampres adalah lembaga berbahaya yang kekuatannya bisa lepas kendali," kata Han Seung-woon, seorang profesor hukum administrasi kepolisian di Universitas Dongshin.

"Karena hanya presiden yang memiliki wewenang untuk mengendalikannya, dinas keamanan dapat menyalahgunakan kekuasaan dan berubah menjadi tentara pribadi presiden."

Badan anti-korupsi, Kantor

Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), mengatakan bahwa mereka harus membatalkan upaya penangkapan karena kekhawatiran akan keselamatan personelnnya.

Dinas keamanan Yoon dan pasukan yang berada di bawah kendalinya lebih banyak daripada para pejabat yang menangkapnya, kata CIO. Pada satu titik, katanya, orang-orang Yoon bergabung dalam rantai manusia yang terdiri dari sekitar 200 orang untuk memblokir akses ke Yoon dan kediaman resminya, sementara bus dan kendaraan militer juga digunakan sebagai blokade. Polisi pada Sabtu (4/1/2025) meminta Yoon untuk hadir pada Selasa (7/1/2025) mendatang.

Pengacara Yoon berpendapat bahwa CIO tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki pemberontakan, sehingga surat perintah penangkapan tersebut tidak sah. Pihak oposisi menuntut pe-nangkapan Park karena menghalangi penangkapan Yoon dan mendesak pe-nyelidikan atas dugaan perannya dalam deklarasi darurat militer. (afp, rtr, ist/nei)

# Jam Makan yang Baik untuk Kesehatan Tubuh

**MAKAN** seharusnya tidak hanya dilakukan secara sembarangan, namun perlu memperhatikan banyak aspek penting. Tidak cukup hanya memilih makanan yang sehat, seperti sayuran, buah-buahan, atau makanan rendah lemak, tetapi juga penting untuk memahami pola dan waktu makan yang tepat. Selain makan yang ideal sangat berpengaruh pada metabolisme tubuh, membantu mengatur kadar gula darah, meningkatkan energi, dan menjaga fungsi organ tubuh agar tetap optimal.

Mengapa demikian? Soalnya, tubuh merespons energi yang dibutuhkan secara berbeda, tergantung pada jam makan. Kemampuan untuk membakar kalori dan mengatur nafsu makan sangat terkait dengan ritme sirkadian.

Ketika kamu gagal menyesuaikan waktu makan dengan jam tubuh, ini dapat meningkatkan hormon penyimpanan lemak dan membatalkan semua manfaat dari pola makan sehat yang kamu makan. Yuk, ketahui jam makan ideal berikut ini agar tubuh tetap sehat!

## Rekomendasi Jam Makan yang Tepat dan Menyenangkan

Mencocokkan waktu makan dengan jam tubuh bekerja tidak hanya menyehatkan tubuh melainkan juga membantu mendorong penurunan berat badan. Mengonsumsi makanan sesuai dengan jenis makanan dan jam makan sangat direkomendasikan supaya tubuh tetap sehat.

Berikut ini adalah rekomendasi jam makan yang baik untuk tubuh!

### 6:00 sampai 09:45

Ini adalah waktu terbaik untuk sarapan. Jenis sarapan yang direkomendasikan adalah yang berprotein tinggi seperti telur, daging tanpa lemak, yoghurt, dan selai. Jika kamu makan dalam kurun waktu ini, kamu cenderung tidak akan merasa lapar, ketimbang mereka yang menunda sarapan lewat jam 10 pagi.

### 10.00

Jam 10 pagi adalah waktunya untuk makan camilan ringan. Beberapa pilihan camilan ringan tersebut adalah apel, biskuit gandum utuh, atau kamu juga bisa menggabungkan makanan berserat dan yang berprotein tinggi. Kombinasi ini dipercaya dapat mengendalikan rasa lapar sampai jam makan siang tiba.

### 13.00

Jam satu siang adalah waktu yang tepat untuk makan makanan berat. Kamu disarankan untuk segera makan sebelum lewat jam makan siang. Jika kamu makan siang lewat jam 16.30, tubuh sudah mengalami penurunan toleransi glukosa yang pada akhirnya butuh waktu lama untuk mengubah karbohidrat menjadi energi.

### 18.00

Jam 18.00 adalah waktu makan malam yang ideal. Seiring berjalannya hari

tubuh mulai mengubah metabolismenya dan mengurangi jumlah lemak yang digunakan. Jika kamu mencoba menurunkan berat badan, makan semakin larut waktu makan dapat berkontribusi pada penambahan berat badan.

Sebagai catatan tambahan, makan malam lebih awal dan tidur tidak larut malam akan membantu tubuh mendapatkan istirahat berkualitas. Ketika kamu tidur lebih awal, kamu tidak membutuhkan tambahan makanan untuk dikunyah sehingga tidak ada penambahan kalori. Nah, supaya tidur lebih awal, kamu direkomendasikan untuk makan makanan yang tinggi serat dan rendah lemakjenuh.

## Hal-Hal Lain yang Memengaruhi Jam Makan Sehat

Pada akhirnya, jam makan yang baik agar tubuh sehat akan bervariasi dari orang ke orang. Selain jam makan yang sudah direkomendasikan di atas, ada beberapa hal lain yang penting untuk diperhatikan, seperti:

### 1. Makan Lebih Awal Lebih Baik Ketimbang Telat Makan

Terkadang ada hal-hal tertentu yang membuat kamu menghalang makan sesuai dengan waktunya. Jika itu berkemungkinan terjadi, hal yang lebih baik adalah makan lebih awal ketimbang telat makan. Telat makan akan mengganggu ritme sirkadian tubuh. Itulah sebabnya kamu perlu mempertimbangkan ritme sirkadian.

Ketika kamu makan terlalu larut, tubuh mungkin tidak mencerna dan memproses makanan dengan efisien.

### 2. Kondisi Kesehatan

Beberapa obat harus diatur waktunya dengan makanan. Kondisi seperti diabetes juga memerlukan makan pada waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk mempertahankan kadar gula darah yang tepat.

### 3. Rutinitas Harian

Menjaga konsistensi diperlukan untuk membantu membatasi gangguan pada ritme sirkadian. Bayangkan bila kamu telat sarapan, tentu saja jam makan siangmu akan bergeser, yang pada akhirnya juga akan memundurkan waktu makan malam.

### 4. Jenis Makanan

Pada hari-hari ketika kamu tidak punya pilihan selain makan larut malam, langkah baiknya bila kamu memilih makanan kecil, padat nutrisi, namun sederhana. Ini dilakukan untuk membantu sistem kerja pencernaan dan membatasi gangguan ritme sirkadian.

### 5. Insting

Waktu makan kemungkinan akan berfluktuasi dari hari ke hari. Penting untuk memercayai insting dan membiarkan diri makan saat lapar, bahkan jika itu pada waktu yang berbeda dari yang sudah ditetapkan. (nei,ist/dya)



# Ilmuwan Latih Robot Operasi Bedah Lewat Video

**ILMUWAN** berhasil melatih robot untuk melakukan operasi bedah dengan menonton video, mencapai kemampuan yang setara dengan ahli bedah manusia. Robot ini dapat mempelajari teknik operasi video dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam prosedur bedah yang kompleks.

Melansir Techspot, Rabu (1/1/2025), peneliti dari Universitas Johns Hopkins dan Universitas Stanford telah melatih robot untuk melakukan tugas bedah dengan ketepatan seperti dokter manusia dengan menonton video. Hal ini dipresentasikan pada Konferensi Pembelajaran Robot di Munich baru-baru ini. Keberhasilan ini menandai langkah signifikan menuju robot bedah yang lebih otonom dan dapat menjadi solusi parsial untuk kekurangan dokter bedah di AS.

Bantuan robot dalam operasi bukanlah hal baru. Sejak 1985, ketika PUMA 560 pertama kali membantu biopsi otak, robot telah membantu dokter melakukan berbagai prosedur, termasuk pengangkatan kantong empedu, histerektomi, dan operasi prostat. Robot-robot ini, yang dipandu oleh dokter menggunakan pengontrol seperti joystick, telah berperan penting dalam meminimalkan getaran tangan manusia selama prosedur yang rumit.

Namun, terobosan baru-baru ini membawa teknologi ini ke tingkat baru. Tim peneliti telah mengembangkan robot yang mampu melakukan tugas bedah yang rumit secara mandiri, termasuk memanipulasi jarum, mengikat



simpul, dan menjahit luka. Hal yang membedakan robot-robot ini adalah kemampuannya untuk belajar dari video dan memperbaiki kesalahan mereka tanpa campur tangan manusia.

Pendekatan tim untuk melatih robot-robot ini mirip dengan yang digunakan dalam mengembangkan model bahasa seperti ChatGPT. Namun, alih-alih bekerja dengan kata-kata, sistem tersebut menggunakan bahasa yang menggambarkan posisi dan arah penjepit robot.

"Kami membangun model pelatihan kami menggunakan rekaman video robot yang melakukan tugas bedah pada bantalan jahitan latihan," Dr Axel Krieger, seorang profesor madya di Johns Hopkins Whiting School of Engineering yang mengawasi penelitian tersebut.

"Setiap gambar dalam rangkaian video diubah menjadi data numerik, yang kemudian diterjemahkan oleh model menjadi tindakan robot."

Metode ini secara signifikan mengurangi kebutuhan untuk memprogram setiap gerakan individu yang diperlukan untuk prosedur medis. Robot yang dilatih menunjukkan keterampilan mereka di lingkungan yang berbeda, berhasil melakukan tugas pada sampel daging babi dan ayam.

"Kami telah mengembangkan sistem yang memungkinkan Anda berbicara dengan robot seperti Anda berbicara dengan dokter residen bedah," kata Ji Woong "Brian" Kim, peneliti pascadoktoral di tim tersebut.

"Anda dapat mengatakan hal-hal seperti, 'Lakukan tugas ini,' atau 'Pindah ke kiri' dan 'Pindah ke kanan.'"

Menurut American Association of Medical Colleges, pengembangan robot bedah yang lebih otonom dapat membantu mengatasi kekurangan 10.000 hingga 20.000 dokter bedah di Amerika Serikat pada tahun 2036.

"K a m i t i d a k m e n c o b a

menggantikan dokter bedah. Kami hanya ingin mempermudah pekerjaan dokter bedah," kata Dr Krieger.

Meskipun kemajuannya mengesankan, para ahli mengatakan masih banyak tantangan yang harus dihadapi sebelum robot bedah yang sepenuhnya otonom menjadi kenyataan. "Taruhannya sangat tinggi karena ini adalah masalah hidup dan mati," kata Dr Dipen J Parekh, direktur bedah robotik di Fakultas Kedokteran Universitas Miami Miller.

"Anatomi setiap pasien berbeda, begitu pula cara penyakit berperilaku pada pasien."

Lebih jauh lagi, seiring kemajuan teknologi, muncul pertanyaan penting tentang tanggung jawab, privasi, dan akses.

Dr Amer Zureikat, direktur bedah robotik di University of Pittsburgh Medical Center, mencatat beberapa kekhawatiran tentang akuntabilitas jika terjadi kesalahan bedah. Menentukan tanggung jawab ketika banyak pihak terlibat dalam pengembangan dan penggunaan robot bedah otonom akan menjadi rumit, paling tidak, dengan potensi kesalahan meluas ke berbagai pemangku kepentingan, termasuk dokter yang mengawasi, pengembang AI, administrasi rumah sakit, atau bahkan produsen robot itu sendiri.

Kekhawatiran privasi juga tampak besar, khususnya terkait penggunaan video bedah nyata untuk melatih sistem ini. Selain itu, ada pertanyaan tentang akses yang sama terhadap teknologi dan potensi dokter bedah menjadi terlalu bergantung pada bantuan robotik.(nei,ist/dya)



# Tren Makeup 2025 yang Diprediksi Para MUA

**INDUSTRI** kecantikan adalah salah satu ranah yang sangat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman melalui inovasi, tren terbaru, dan teknologi berevolusi untuk memenuhi kebutuhan. Ini terbukti dari tren makeup yang selalu berubah setiap tahunnya.

Sebagai contoh, beberapa tahun lalu, tren makeup dengan alis tebal dan tegas sangat digandrungi para perempuan. Tapi belakangan ini, kebanyakan perempuan mulai beralih pada alis yang serat-serat rambutnya masih kelihatan sehingga tampak natural.

Peralihan itu sejalan dengan tren makeup tahun ini, yakni "clean makeup look", atau makeup yang sangat simpel dan menonjolkan fitur alami wajah. Lantas, seperti apa tren makeup 2025? Apakah masih melanjutkan tren makeup simpel yang hype di tahun ini?

## Tren Makeup 2025

Sejumlah make-up artist (MUA) ternama seperti Patrick Ta dan Donny Davy mengutarakan pendapatnya tentang tren makeup 2025 dalam laman Cosmopolitan. Berikut beberapa jenis makeup yang mereka prediksi akan tren di tahun mendatang.

### 1. Makeup Grunge yang Kalem

Makeup grunge ditandai dengan pemilihan warna gelap di area mata dan bibir. Warna yang dipilih biasanya seperti dark red, hitam, maupun

nungu.

Meski begitu, di tahun mendatang, grunge yang akan tren kemungkinan besar menggunakan warna-warna gelap yang kalem. Misalnya, warna abu-abu kecokelatan, krem, dan yang paling gelap adalah abu-abu tua. Nuansa makeup ini akan membuatmu terlihat seperti perempuan glamor di tahun 90-an. Namun, dengan sentuhan yang lebih modern agar tak tampak ketinggalan zaman.

### 2. Makeup Glass Skin

Poin utama dari makeup glass skin adalah membuat kulit tampak bercahaya secara alami. Jadi, makeup yang digunakan harus dibuat senatural mungkin. Hindari memakai foundation atau base makeup yang hasil akhirnya matte. Selain itu, sebelum makeup, pastikan kulit terasa lembap dan mendapatkan hidrasi yang cukup dengan menggunakan skincare yang tepat.

Setelah memakai base, sebaiknya tak perlu menambah terlalu banyak layer pada makeup. Semakin sedikit produk yang digunakan, maka akan semakin natural kelihatannya.

### 3. Makeup dengan Aksentuasi Metalik

Makeup yang satu ini lebih menonjolkan area mata dan bibir yang berkilau. Kilau tersebut diperoleh dari pengaplikasian glitter metalik di kelopak mata, kemudian disempurnakan dengan penambahan eyeliner yang tegas. Sementara untuk bagian bibir, tambahkan sedikit kilau menggunakan lip gloss. Makeup ini akan membuat penampilan terasa modern dan kelihatan heboh, padahal

sebenarnya simpel.

### 4. Makeup dengan Sentuhan Blush On yang Beda

Pada umumnya, blush on diaplikasikan di apple cheeks dan sesuai dengan bentuk wajah. Warnanya pun menyesuaikan dengan undertone dan warna kulit. Namun, pada 2025, penggunaan blush on mungkin akan sedikit berbeda. Salah satu metode aplikasi blush on yang diprediksi akan populer adalah "boy blush".

Dinamakan "boy blush" karena metode penggunaan blush on ini terinspirasi dari pipi anak laki-laki yang kemerahan setelah berolahraga.

Metodenya fokus pada penggunaan blush on di bawah pipi. Tujuannya bukan untuk menciptakan ilusi bentuk wajah yang lebih tirus atau ramping, tetapi untuk membuat wajah terlihat merona secara alami.

### 5. Teknologi AI untuk Personalisasi Makeup

Kecerdasan buatan (AI) diprediksi akan semakin berperan dalam industri makeup. Teknologi ini akan menghadirkan pengalaman yang lebih personal, di mana produk dan penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik unik setiap individu.

Aplikasi berbasis AI, misalnya, dapat menganalisis warna kulit, tekstur, dan preferensi pengguna untuk merekomendasikan produk yang paling cocok. Selain itu, AI juga akan memberikan tips aplikasi yang disesuaikan dengan bentuk wajah atau kondisi kulit tertentu, menjadikan proses makeup lebih efektif dan presisi.

### 6. Fokus pada Makeup yang Menyehatkan Kulit

Banyak merek kecantikan diperkirakan akan lebih mengutamakan produk berbasis bahan alami dan bebas bahan kimia berbahaya. Makeup yang memberikan manfaat tambahan, seperti meredakan peradangan atau melindungi kulit dari polusi, akan semakin diminati.

Produk-produk ini tidak hanya dirancang untuk menutupi kekurangan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan kulit. Inovasi dalam formula makeup yang ramah kulit akan terus berkembang demi memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih peduli akan kesehatan.

### 7. Makeup Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan

Kepedulian terhadap lingkungan akan terus memengaruhi industri kecantikan di tahun 2025. Produk dengan kemasan ramah lingkungan, seperti yang dapat didaur ulang atau berbahan organik, akan semakin populer.

Selain itu, banyak merek akan fokus pada bahan-bahan alami dan etis, menciptakan produk yang bebas dari bahan kimia berbahaya seperti paraben dan sulfat. Konsumen yang semakin sadar akan dampak lingkungan akan mendukung tren ini, menjadikannya bagian integral dari masa depan makeup.

(nei,ist/dya)

Patrick Ta

Donny Davy

**Beban Baru: ... (dari Hal 1)**

**PEMERINTAH** resmi memberlakukan opsen pajak mulai 5 Januari 2025, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Namun, di balik tujuan tersebut, kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan konsumen dan pelaku industri otomotif karena diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga kendaraan bermotor yang cukup signifikan.

Menurut aturan, opsen PKB dan BBNKB dikenakan sebesar 66 persen dari nilai pajak yang terutang. Namun, ini tidak berarti pajak kendaraan langsung naik sebesar 66 persen karena tarif dasar PKB dan BBNKB telah disesuaikan.

"Setelah tarif turun, pemerintah daerah bisa mengenakan opsen pajak sebesar 66 persen dari pajak yang terutang," kata Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK, Lydia Kurniawati Christyan, dikutip Minggu (5/1/2025).

Selain itu, dalam Pasal 107 Ayat 2 UU HKPD, pemungutan opsen PKB dan BBNKB didasarkan pada nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan/atau alamat pemilik kendaraan di wilayah kabupaten/kota.

Pemerintah berharap penerapan opsen pajak dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan dan menciptakan sistem fiskal yang lebih transparan dan mandiri. "Dengan adanya aturan ini, daerah diharapkan lebih mandiri dalam mengelola keuangan mereka, dan pembangunan dapat lebih merata," pungkas Lydia.

Namun, di sisi lain, konsumen dan pelaku industri otomotif diharapkan

dapat mempersiapkan diri menghadapi dampak dari kebijakan baru ini.

Kekhawatiran itu diungkapkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia menyebut penerapan opsen pajak kendaraan yang berlaku mulai 5 Januari 2025 memberikan dampak signifikan ke industri otomotif dalam negeri.

Agus bahkan menyebut hal itu membuat sektor otomotif 'gerah'. Opsen pajak kendaraan dinilai lebih memberatkan ketimbang PPN 12% yang menasar hampir seluruh model mobil yang dijual di Tanah Air.

Tak cuma itu, Agus juga mengatakan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) membuat masyarakat jadi enggan membeli kendaraan. Pada akhirnya daerah yang akan dirugikan.

"Saya melihatnya pimpinan daerah akan mencari atau menerbitkan regulasi untuk relaksasi. Karena nggak akan bisa orang-orang lokalnya beli mobil dan itu juga nggak bakal masuk ke mereka dan nggak akan berputar," tutur Agus.

Menurut keterangan Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meskipun tarif PKB dan BBNKB akan diturunkan oleh pemerintah provinsi, tambahan opsen ini tetap memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat akan merasakan kenaikan beban pajak secara keseluruhan,

Terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan menengah. "Di tengah tantangan ekonomi global dan domestik, kebijakan ini harus diimplementasikan secara hati-hati agar tidak memberatkan masyarakat maupun industri otomotif yang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional," ujar Achmad beberapa waktu lalu.

Selain itu, Achmad juga menambahkan bahwa penerapan opsen ini juga harus diikuti oleh mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas.

Terpisah, rodusen otomotif asal Korea Selatan, PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengaku masih mengkaji potensi kenaikan harga mobil, seiring dengan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dan pungutan opsen pajak oleh pemerintah daerah.

Sebagaimana diketahui, PPN 12% dan opsen pajak menjadi salah satu tantangan bagi penjualan otomotif pada tahun ini. Sebab, konsumen akan semakin berat untuk membeli kendaraan, sehingga nantinya juga akan berdampak ke menurunnya

penjualan para produsen mobil.

"Kami masih mempertimbangkan banyak hal, jadi belum ada yang bisa saya share soal harga," ujar Chief Marketing Officer Hyundai Motors Indonesia, Budi Nur Mukmin, dikutip Minggu (5/1/2025).

Adapun, pemerintah saat ini memberikan transisi penerapan PPN 12% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 131/2024. Pengenaan tarif pajak 12% untuk barang mewah akan dikenakan mulai 1 Februari 2025.

**Tidak Berlaku di Jakarta**

Ternyata opsen pajak kendaraan bermotor tidak akan berlaku di seluruh Indonesia. Ada provinsi yang tidak akan menjalankan opsen pajak kendaraan bermotor.

Opsen pajak kendaraan bermotor tidak diterapkan di Jakarta. Hal ini diungkap oleh Humas Bapenda DKI Jakarta Herlina Ayu. "Jadi kalau di DKI Jakarta itu tidak ada opsen. Di Provinsi lain memang ada opsen PKB. Opsen itu kan pembagian untuk kabupaten-kabupaten di bawah provinsi," ujar Herlina.

"Karena DKI itu tidak ada kabupaten, jadi untuk PKB dipungut oleh provinsi. PKB itu kan pajak provinsi dan dikelola sendiri oleh daerahnya. Jadi memang kecuali Jakarta saja yang enggak ada, karena Jakarta daerah khusus," kata dia.

Menurutnya hal ini berbeda dengan provinsi lain, misal di Jawa Barat. PKB dipungut oleh provinsi, sementara persentase opsen pajak kendaraan bermotor akan dibagikan untuk masing-masing kabupaten di provinsi tersebut. "Opsen itu adalah pembagiannya. Provinsi Jawa Barat memungut PKB, setelah itu pembagiannya di kabupaten A, kabupaten B, dan kabupaten C," ucap Herlina.

"Opsen itu bukan pungutan baru, (opsen adalah) pungutan tambahan pajak berdasarkan persentase tertentu," ujarnya.

Opsen pajak kendaraan bermotor adalah amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dari beleid tersebut, nantinya Pemerintah Provinsi dapat memungut opsen dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLBB). Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memungut opsen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Nah, untuk opsen pajak kendaraan bermotor, baik PKB dan BBNKB yang berhak dikenakan oleh pemkab/pemkot adalah sebesar 66% dari PKB dan BBNKB yang diterima pemprov.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Lydia Kurniawati Christyana memastikan bahwa pemberlakuan opsen pajak MBLBB dan kendaraan bermotor pada tahun 2025 tidak akan menambah beban masyarakat atau Wajib Pajak.

"Opsen itu bukan beban tambahan ya, bukan pungutan yang ditambahkan, tidak," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lamaini.

Hal ini dikarenakan pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor ter-sebut juga diikuti dengan penurunan tarif PKB dan BBNKB dalam UU HKPD. Misalnya saja, tarif PKB untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama ditetapkan maksimal sebesar 1,2% dari sebelumnya sebesar 2%.

Nah, setelah ketentuan penurunan tarif ini, maka pemerintah daerah dapat mengenakan opsen pajak kendaraan bermotor atau tambahan yang ditetapkan sebesar 66% dari pajak terutang.

"Jadi sebetulnya beban Wajib Pajak sekarang itu turun dari beban Wajib Pajak ketika pajak kendaraan bermotor mazhab Undang-Undang 28/2009. Jadi bukan pungutan tambahan," katanya.

Tidak hanya itu, Lydia juga menyebut bahwa opsen memberikan kepastian penerimaan Kabupaten/Kota atas bagiannya dari penerimaan PKB dan BBNKB. Dengan begitu, tidak ada lagi mekanisme bagi hasil seperti pada aturan sebelumnya.

"Di UU 1/2022 tidak ada lagi bagi hasil. Jadi provinsi hanya berhak 1,2%, kabupaten/kota langsung 66% dari perkaliannya tadi langsung masuk ke kabupaten/kota," katanya.

"Penerimaan ini menjadi kepastian (kabupaten/kota) nanti di 2025, tidak menunggu provinsi membagi hasil," imbuh Lydia.

Sementara itu, Rizki Widiasmoro yang merupakan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda IIB, Direktorat Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Ederan yang bertujuan untuk mengawal proses persiapan pelaksanaan kebijakan opsen dan bentuk sinergi pemungutan opsen pajak.

Dalam hal ini, Kemendagri telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mulai menyusun Peraturan Gubernur mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB termasuk didalamnya mengatur sinergi pemungutan opsen yang paling lambat diselesaikan pada Oktober 2024.

Tidak hanya itu, dalam mendukung pelaksanaan opsen PKB dan opsen BBNKB maka perlu disusun perjanjian kerjasama antara pemprov dan pemkab/pemkot terkait optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen paling lambat Oktober 2024 ini.

"Tentunya ini diharapkan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan itu di paling lambat diselesaikan dengan kita berikan waktu Oktober 2024, karena mengingat (opsen) ini sudah dilaksanakan pemungutan mulai Januari 2025," kata Rizki. (wid, rsk, din, ant, ist/dya)



STNK kendaraan bermotor dengan 7 kolom pajak (bawah) dibandingkan dengan yang lama (atas).

# Penyakit Pernapasan yang Melonjak di China Malaysia Catat 327 Kasus HMPV, Indonesia Waspada

**JAKARTA** - Malaysia mendeteksi 327 kasus infeksi human metapneumovirus (HMPV). Virus yang tengah memicu lonjakan penyakit pernapasan di China. Catatan kasus HMPV di China pada 2024 meningkat dari 225 kasus di sepanjang 2023.

Stafus Menteri Kesehatan, dr. Ngabila Salama, mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bakal melakukan penyelidikan yang masif jika nantinya menemukan 1 kasus HMPV di Indonesia.

"Jika nantinya 1 kasus ditemukan, perlu dilakukan tracing atau penyelidikan epidemiologi masif," ujar Ngabila Salama kepada wartawan, Minggu (5/1/2024).

Ngabila menyebut bahwa saat ini Kemenkes terus melakukan langkah antisipasi kemunculan virus HMPV tersebut. "Mengaktifkan sistem surveilans berbasis masyarakat (kader, RT, RW) dan fasilitas kesehatan, baik puskesmas dan RS untuk kewaspadaan terhadap HMPV," terangnya

Diketahui, ementerian Kesehatan Malaysia mengatakan hMPV merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus dari famili Pneumoviridae.

"Ini bukan penyakit baru dan di negara ini, infeksi hMPV tidak perlu dilaporkan atau diberitahukan menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1988," katanya dalam sebuah pernyataan, baru-baru ini, dikutip dari Straits Times, Minggu (5/1/2025).

Malaysia mengatakan masyarakat harus tetap waspada karena infeksi saluran pernapasan akan terus berkembang di masyarakat. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk secara proaktif menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran infeksi kepada orang lain, terutama di tempat tertutup dan ramai.

Negeri Jiran juga akan terus memantau perkembangan infeksi saluran pernapasan baik di dalam negeri maupun internasional, meningkatkan kesiapsiagaan dan mengambil tindakan yang tepat.

"Peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut pada akhir tahun dan awal tahun berikutnya merupakan fenomena yang sudah diperkirakan, sejalan dengan tren serupa yang dilaporkan di negara lain, terutama yang mengalami musim dingin, seperti China."

"Sebagai langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran infeksi, Kementerian Kesehatan terus melakukan pemantauan dari waktu ke waktu, baik di dalam negeri maupun di



Kasus infeksi HMPV mengalami peningkatan signifikan di China, hingga masyarakat memenuhi rumah sakit. (Ilustrasi-Reuters)

luar negeri. Ini termasuk virus penyebab Covid-19, influenza, dan infeksi saluran pernapasan lainnya," kata otoritas setempat.

Kementerian Kesehatan mengimbau masyarakat yang mengalami gejala berkepanjangan atau memburuk untuk segera mencari pertolongan medis di fasilitas kesehatan pemerintah atau swasta terdekat.

Masyarakat juga diminta untuk sering mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, dan mengenakan masker bagi mereka yang berisiko tinggi atau berada di area ramai.

Terkait COVID-19, kementerian mengatakan situasi masih terkendali, tidak ada lonjakan kasus mendadak yang memerlukan perawatan intensif dan tidak ada kematian terkait yang dilaporkan sejak 25 April 2024.

Di Malaysia, jumlah total kasus COVID-19 pada 2024 menunjukkan penurunan signifikan sebesar 50,4 persen, turun dari 202.962 kasus pada tahun 2023 menjadi 100.666 kasus pada tahun 2024. Kematian juga menurun dari 441 pada tahun 2023 menjadi 57 pada tahun 2024.

## DPR Minta Pintu Masuk Diperketat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta kepada pemerintah untuk fokus pada perkembangan virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang tengah mewabah secara cepat di China.

Kata Nihayatul, pemerintah harus bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran wabah tersebut di Indonesia. Salah satunya dengan memperketat pemantauan di pintu-pintu masuk negara.

"Pemerintah perlu meningkatkan sistem pemantauan di pintu-pintu masuk negara, seperti bandara dan pelabuhan, untuk memeriksa gejala-gejala yang mirip dengan infeksi

saluran pernapasan akut. Ini termasuk penggunaan tes diagnostik yang tepat untuk mendeteksi virus HMPV lebih awal," ujar Nihayatul dalam keterangannya, Minggu (5/1/2024).

Pemerintah kata dia juga diharapkan berkoordinasi dengan World Health Organization (WHO) dan negara lain untuk mendapatkan informasi mengenai penyebaran virus HMPV dan vaksinasi yang diperlukan.

Menurut dia, upaya itu menjadi salah satu deteksi dini bagi pemerintah untuk bisa mengantisipasi terjadinya penyebaran virus secara masif.

"Pemerintah perlu terus berkoordinasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara-negara yang terdampak untuk mendapatkan informasi terkini mengenai virus ini, termasuk pola penyebaran, tingkat virulensi, dan vaksinasi yang diperlukan," jelas Nihayatul.

Tak cukup di situ, pemerintah juga dinilai perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tanpa memberi rasa khawatir.

"Edukasi Masyarakat tanpa memberikan rasa khawatir: Menyampaikan informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat mengenai cara-cara pencegahan infeksi, seperti mencuci tangan, menggunakan masker jika sakit, dan menjaga kebersihan lingkungan, tetap penting untuk mencegah penyebaran virus," ujar Nihayatul.

Meski wabah HMPV ini belum menunjukkan ancaman sebesar Covid-19 namun kata dia, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang proaktif dan berbasis data.

Tak hanya itu, kepastian rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk siap menangani virus HMPV juga harus menjadi salah satu fokus.

Pasalnya, kapasitas tenaga medis

## GEJALA HUMAN METAPNEUMOVIRUS (HMPV)



Hidung Tersumbat atau Berair



Batuk



Sesak Nafas



Lelah



Sakit Tekak



Demam



Ruam

menjadi kunci menghadapi wabah virus tersebut."Memastikan rumah sakit dan tenaga kesehatan siap menangani kasus infeksi virus pernapasan lainnya. Peningkatan kapasitas tenaga medis dalam menghadapi wabah virus pernapasan juga menjadi kunci," jelas Nihayatul.

Sebelumnya, juru bicara Kemenkes RI, drg. Widyawati, juga telah memastikan bahwa penyebaran virus HMPV tersebut belum sampai ke Indonesia.

"Saat ini belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia. Meski begitu, kami mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat," kata drg. Widyawati dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025). (sti, wid, rls/dya)